

Persepsi mahasiswa PPKn Universitas Negeri Padang terhadap program pemerintah Makan Bergizi Gratis

Reza Darma Yanda, *Susi Fitria Dewi, Irwan Hamdi, Cici Nur Azizah

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FIS Universitas Negeri Padang

Corresponding Author: *Susi Fitria Dewi

E-mail: susifd@fis.unp.ac.id

Abstract

This study was motivated by the Free Nutritious Meals (Makan Bergizi Gratis/MBG) Program, which is one of the priority policies of the Prabowo–Gibran administration aimed at improving nutritional fulfillment and human resource development. The program has generated various responses among the public, including university students as a group with an interest in public policy issues. This study aims to identify and analyze the perceptions of Civic Education students at Universitas Negeri Padang toward the Free Nutritious Meals (MBG) Program based on four dimensions: knowledge, opinions, evaluations, and attitudes. The study employed a quantitative approach using a descriptive method involving 81 Political Science students at Universitas Negeri Padang who were selected through purposive sampling. Data were collected through observation, questionnaires, and documentation studies, and were analyzed using descriptive statistics in the form of percentages. The results showed that students' overall perception of the MBG Program was categorized as negative, with an average score of 53.80%. The scores for each dimension were 11.52% for knowledge, 72.42% for opinions, 59.66% for evaluations, and 71.60% for attitudes, all of which were categorized as negative based on the research classification. These findings indicate that Civics students at Universitas Negeri Padang tend to have a less positive perception of the MBG Program based on the four dimensions examined. This study is expected to contribute to the development of public policy studies and provide input for evaluating the implementation of the Free Nutritious Meals Program in Indonesia.

Article History

Received: 23 Jan 2026

Accepted: 07 Sept 2026

Published: 19 Sept 2026

Keywords:

Student perception, MBG, free nutritious meals

PENDAHULUAN

Kebijakan publik merupakan instrumen pemerintah dalam merespons persoalan masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan melalui serangkaian keputusan serta tindakan yang terorganisasi. Keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh tujuan yang dirumuskan, tetapi juga oleh kualitas implementasi, kapasitas kelembagaan, ketersediaan sumber daya, mekanisme pengawasan, dan keterlibatan masyarakat. Aspek implementasi menjadi penting karena pelaksanaannya melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, penyedia makanan, serta masyarakat sebagai penerima manfaat. Dengan demikian, respons masyarakat terhadap kebijakan perlu diperhatikan karena dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana suatu kebijakan dipahami, dinilai, dan diterima dalam lingkungan sosialnya (Herdiana, 2025; Waluyo, 2025).

Salah satu kebijakan prioritas pemerintahan Prabowo–Gibran adalah Program Makan Bergizi Gratis, yang mulai dilaksanakan pada Januari 2025 sebagai bagian dari upaya pemenuhan gizi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pelaksanaan MBG kemudian berkembang secara signifikan dari sisi jumlah penerima maupun dukungan anggaran. Berdasarkan dokumen pemerintah, kebutuhan anggaran MBG untuk memenuhi target 82,9 juta penerima pada 2026 mencapai Rp335 triliun, sedangkan data realisasi hingga 31 Maret 2026 menunjukkan sekitar 61,8 juta penerima manfaat yang dilayani melalui 26.362 SPPG. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa MBG telah berkembang menjadi kebijakan publik berskala nasional dengan cakupan penerima dan konsekuensi fiskal yang besar (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025, 2026).

Perluasan cakupan tersebut pada saat yang sama diikuti oleh berbagai persoalan implementasi yang menjadi perhatian pemerintah dan publik. Pada Agustus 2026, pemerintah melakukan evaluasi terhadap 27.485 SPPG dan menyatakan bahwa 833 SPPG telah ditutup, sementara 455 SPPG lainnya akan ditutup secara permanen karena tidak memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Pada September 2026, Badan Gizi Nasional juga menyampaikan bahwa berdasarkan evaluasi internal, sekitar 80–90% kasus gangguan kesehatan yang terjadi berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap standar operasional prosedur dalam pengelolaan makanan. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa perluasan MBG perlu berjalan bersamaan dengan penguatan keamanan pangan, kepatuhan terhadap standar operasional, serta pengawasan dan tata kelola program (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2026; Badan Gizi Nasional, 2026).

Temuan akademik terbaru memperlihatkan bahwa persoalan implementasi tersebut merupakan bagian penting dalam menilai penyelenggaraan MBG. Herdiana (2025) menemukan bahwa implementasi MBG masih menghadapi hambatan berupa aturan yang belum komprehensif, rantai distribusi makanan yang kaku, serta sistem pengawasan dan keterlibatan masyarakat yang belum optimal. Sementara itu, Agnia et al. (2026) menemukan sejumlah persoalan pada tingkat pelaksanaan lokal, antara lain keterbatasan cakupan layanan, keamanan makanan, kesenjangan akses, dan kompetensi tenaga pelaksana. Penelitian Erlyn et al. (2026) juga menunjukkan bahwa penyelenggaraan MBG masih menghadapi tantangan berupa pemantauan berbasis risiko yang belum optimal, keterbatasan sumber daya pengawasan, koordinasi lintas sektor yang belum terintegrasi, serta mekanisme umpan balik dan tindak lanjut yang belum sistematis. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan MBG masih menghadapi kompleksitas tata kelola yang perlu diperhatikan dalam menilai perkembangan kebijakan tersebut.

Kondisi tersebut menjadikan persepsi publik terhadap MBG penting untuk dikaji. Persepsi tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai keberadaan suatu program,

tetapi juga mencakup bagaimana individu memberikan pendapat, melakukan penilaian, dan membentuk sikap terhadap kebijakan yang diterimanya. Sejumlah penelitian mengenai MBG telah menggunakan media sosial untuk mengidentifikasi respons publik, sedangkan penelitian lainnya berfokus pada implementasi, kebijakan fiskal, keamanan pangan, dan tata kelola. Namun, penelitian yang secara khusus menggambarkan persepsi mahasiswa terhadap MBG masih relatif terbatas, terutama mahasiswa yang berada dalam lingkungan akademik ilmu sosial dan politik. Oleh karena itu, kajian terhadap persepsi mahasiswa dapat melengkapi penelitian sebelumnya dengan memberikan gambaran mengenai respons kelompok akademik terhadap kebijakan MBG (Waluyo, 2025; Herdiana, 2025; Erlyn et al., 2026).

Mahasiswa Prodi PPKn relevan untuk dikaji karena lingkungan keilmuan yang mereka tempuh berkaitan dengan pemerintahan, kebijakan publik, proses politik, serta hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Perspektif tersebut memungkinkan mahasiswa memberikan respons terhadap MBG tidak hanya berdasarkan tujuan program, tetapi juga dengan mempertimbangkan aspek implementasi, pengawasan, pembiayaan, ketepatan sasaran, dan keberlanjutan kebijakan. Relevansi mahasiswa sebagai kelompok yang memiliki perhatian terhadap isu kebijakan publik juga semakin penting ketika MBG berkembang menjadi kebijakan dengan cakupan nasional dan konsekuensi fiskal yang besar. Dengan demikian, penelitian terhadap mahasiswa PPKn Universitas Negeri Padang dapat memberikan konteks empiris mengenai bagaimana kebijakan nasional dipersepsikan oleh mahasiswa di tingkat perguruan tinggi (Waluyo, 2025; Hadinata, 2026).

Berdasarkan kajian tersebut, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menentukan secara langsung berhasil atau tidaknya Program MBG secara nasional. Penelitian ini secara khusus berupaya menggambarkan persepsi mahasiswa PPKn Universitas Negeri Padang terhadap MBG melalui empat aspek, yaitu pengetahuan, pendapat, penilaian, dan sikap. Fokus tersebut penting karena pemahaman terhadap suatu kebijakan merupakan salah satu bagian dari proses terbentuknya respons individu, sedangkan penilaian terhadap implementasi kebijakan dapat berkembang berdasarkan informasi dan pengalaman yang dimiliki. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana mahasiswa memahami dan merespons MBG di tengah perkembangan kebijakan serta berbagai persoalan implementasi yang berlangsung (Herdiana, 2025; Erlyn et al., 2026).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Metode ini dipilih karena tujuannya adalah untuk menggambarkan dan menganalisis persepsi mahasiswa PPKn UNP terhadap Program Makan Bergizi Gratis di era pemerintahan Prabowo-Gibran secara objektif berdasarkan data yang diperoleh langsung dari responden. Pendekatan kuantitatif dinilai tepat karena memungkinkan peneliti mengukur variabel secara numerik dan melakukan generalisasi temuan terhadap populasi yang lebih luas.

Penelitian ini dilaksanakan di Prodi PPKn Universitas Negeri Padang. Populasi penelitian terdiri atas seluruh mahasiswa aktif Prodi PPKn angkatan 2021-2024 yang berjumlah 418 orang. Penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria mahasiswa aktif PPKn UNP dan bersedia menjadi responden. Teknik ini dipilih agar peneliti dapat memilih responden yang benar-benar memenuhi kebutuhan penelitian. Jumlah sampel kemudian ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10% (Tatang, 2010). Dari perhitungan tersebut, diperoleh sampel sebanyak 81 responden.

Jumlah tersebut kemudian dialokasikan secara *purposive sampling* berdasarkan jumlah mahasiswa di setiap angkatan, dengan rincian: angkatan 2021 sebanyak 16 orang, angkatan 2022 sebanyak 18 orang, angkatan 2023 sebanyak 21 orang, dan angkatan 2024 sebanyak 26 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 3 cara, yaitu observasi untuk menangkap dinamika awal diskusi mahasiswa mengenai MBG, kuesioner daring (Google Forms) yang disusun berdasarkan skala Likert untuk mengukur persepsi dari empat aspek (pengetahuan, pendapat, penilaian, dan sikap), serta studi dokumentasi untuk mengumpulkan data sekunder dari dokumen misalnya buku, jurnal atau sumber lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa PPKn UNP terhadap Program MBG secara keseluruhan berada pada kategori negatif, dengan rata-rata skor sebesar 53,80%. Persepsi mahasiswa diukur melalui empat dimensi, yaitu pengetahuan, pendapat, penilaian, dan sikap. Berdasarkan hasil pengolahan data, seluruh dimensi berada pada kategori negatif sesuai dengan klasifikasi yang digunakan dalam penelitian. Rincian hasil pada masing-masing dimensi dapat dilihat pada Tabel 1 berikut

Tabel 1. Rata-rata Persepsi Mahasiswa per Dimensi

No	Dimensi	Rata-rata Skor (%)	Kategori
1	Pengetahuan	11,52%	Negatif
2	Pendapat	72,42%	Negatif
3	Penilaian	59,66%	Negatif
4	Sikap	71,60%	Negatif
Rata-rata		53,80%	Negatif

Sumber: Diolah dari data primer

Berdasarkan Tabel 1, dimensi pengetahuan memperoleh rata-rata skor sebesar 11,52% dan berada pada kategori negatif. Dimensi pendapat memperoleh skor 72,42%, sedangkan dimensi penilaian memperoleh skor 59,66%, dan keduanya termasuk kategori negatif. Sementara itu, dimensi sikap memperoleh skor 71,60% dan juga berada pada kategori negatif. Secara keseluruhan, rata-rata keempat dimensi sebesar 53,80% menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap Program MBG berada dalam kategori negatif. Temuan ini menjadi dasar untuk melihat lebih lanjut karakteristik persepsi mahasiswa pada masing-masing dimensi penelitian.

1. Aspek Pengetahuan

Aspek pengetahuan dalam penelitian ini terdiri dari lima butir pernyataan yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana mahasiswa PPKn memahami kebijakan Program MBG pemerintahan Prabowo–Gibran. Aspek ini mencakup pemahaman mengenai keberadaan program, statusnya sebagai janji politik, tujuan utama, sasaran penerima manfaat, serta alokasi anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan program. Pengukuran aspek pengetahuan ini penting karena menjadi dasar bagi pembentukan persepsi mahasiswa terhadap efektivitas dan relevansi kebijakan MBG.

Tabel 2. Aspek Pengetahuan

No,	Pernyataan	Nilai (%)	Kategori	Keterangan
1	Pengetahuan responden terhadap	98,70%	Sangat Setuju	Mayoritas maha-siswa sudah sangat mengetahui keberadaan

	keberadaan program MBG			program MBG sebagai kebijakan pemerintah.
2	Pengetahuan responden terhadap mbg sebagai janji politik prabowo gibran	98,77%	Sangat Setuju	Menunjukkan tingkat kesadaran politik yang tinggi terhadap janji kampanye yang direalisasikan melalui program MBG.
3	Pengetahuan responden terhadap tujuan program	97,53%	Sangat Setuju	Mahasiswa memahami orientasi utama program MBG sebagai kebijakan sosial untuk mengatasi masalah gizi dan kemiskinan.
4	Pengetahuan responden terhadap penerima manfaat program MBG	86,42%	Setuju	Sebagian besar mahasiswa mengetahui dengan cukup jelas kelompok sasaran utama dari program MBG.
5	Pengetahuan responden terhadap anggaran program MBG	62,96%	Setuju	Pengetahuan mahasiswa tentang besaran alokasi anggaran masih tergolong sedang; belum semua mengetahui detail nominal dan implikasinya terhadap APBN.
Rata-rata		88,48%	Setuju (11,52% tidak setuju)	

Sumber: Diolah dari data primer

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 2 di atas, diketahui bahwa tingkat pengetahuan mahasiswa PPKn UNP terhadap Program MBG mencapai rata-rata 88,48%, yang tergolong dalam kategori Sangat Setuju dan 11,52% tidak setuju. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden tidak sekadar mengetahui keberadaan program, melainkan juga memahami secara lebih mendalam terkait tujuan strategisnya, sasaran penerima manfaat, serta besaran anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah. Temuan ini sekaligus merefleksikan bahwa mahasiswa PPKn UNP memiliki tingkat literasi kebijakan publik yang tergolong tinggi dan secara aktif mengikuti perkembangan isu-isu sosial dan politik nasional. Dengan kata lain, mereka tidak hanya bertindak sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai agen kritis yang mampu mencerna dan mengevaluasi kebijakan publik secara rasional.

2. Aspek Pendapat

Pada aspek pengetahuan dalam penelitian ini diukur melalui lima butir pernyataan yang dirancang untuk menggali pemahaman mahasiswa PPKn UNP mengenai kebijakan Program MBG. Cakupan aspek ini meliputi pemahaman tentang eksistensi program, statusnya sebagai janji politik, tujuan utama, kelompok sasaran, serta alokasi anggaran yang disediakan. Pengukuran ini penting dilakukan karena pemahaman menjadi fondasi awal dalam membentuk persepsi mahasiswa terhadap efektivitas dan relevansi kebijakan tersebut.

Tabel 3. Aspek Pendapat

No	Pernyataan	Nilai (%)	Kategori	Keterangan
6	Pendapat responden mengenai MBG	65,44%	Tidak Setuju	Mahasiswa menilai bahwa MBG bukan kebijakan yang

	sebagai kebijakan yang mendesak			mendesak dijalankan dalam konteks kebutuhan nasional saat ini.
7	Pendapat responden terhadap MBG sebagai kebutuhan masyarakat.	66,66%	Tidak Setuju	Responden berpa-ndangan bahwa MBG belum menjadi kebutuan prioritas masyar-akat jika disban-dingkan dengan program lain.
8	Pendapat responden terhadap MBG sebagai program prioritas dibandingkan pendidikan gratis	77,77%	Tidak Setuju	Sebagian besar mahasiswa tidak sependapat bahwa MBG lebih penting dibanding kebijakan sosial lain yang lebih mendasar.
9	Pendapat responden terhadap pengawasan standar kesehatan makanan	82,71%	Tidak Setuju	Mahasiswa menunjukkan pandangan kritis terhadap lemahnya peran pemerintah dalam mengawasi standar gizi dan kebersihan MBG.
10	Pendapat responden terhadap anggaran MBG yang dialihkan	74,07%	Tidak Setuju	Mahasiswa menilai perlunya realokasi anggaran MBG agar tidak menekan sektor vital seperti kesehatan dan pendidikan.
11	Pendapat responden terhadap program MBG sebagai program ambisius	67,90%	Tidak Setuju	Responden menilai MBG terlalu ambisius untuk kondisi fiskal Indonesia saat ini yang masih terbatas.
Rata-Rata		72,42%	Tidak Setuju	

Sumber: Diperolah dari data primer

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 3 di atas, diperoleh hasil pengolahan data mengenai pendapat mahasiswa PPKn UNP terhadap Program MBG. Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pendapat mahasiswa berada pada angka 72,42%, yang termasuk dalam kategori Tidak Setuju (negatif). Temuan ini mengindikasikan bahwa mahasiswa tidak hanya melihat dari segi niat politik (*political will*), tetapi juga dari sisi kemampuan administratif. Mereka melihat bahwa MBG memang memiliki tujuan sosial yang baik, tetapi pada saat yang sama, program ini berisiko menimbulkan beban fiskal yang besar dan belum didukung oleh sistem pengawasan yang memadai.

3. Aspek Penilaian

Pada aspek penilaian, digunakan lima butir pernyataan untuk mengukur bagaimana mahasiswa PPKn UNP menilai kebijakan MBG dari berbagai sisi, terutama terkait dampaknya terhadap masyarakat. Instrumen ini disusun untuk melihat sejauh mana mahasiswa menilai relevansi, efektivitas, dan keberlanjutan program, termasuk kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat, kontribusinya dalam meringankan beban ekonomi keluarga, efektivitasnya dalam menurunkan angka stunting, serta potensi implikasinya terhadap anggaran negara.

Tabel 4. Aspek Penilaian

No	Pernyataan	Nilai (%)	Kategori	Keterangan
12	Penilaian responden terhadap program MBG yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat	66,67%	Tidak Setuju	Mahasiswa menilai bahwa program MBG belum benar-benar mencerminkan kebutuhan utama masyarakat secara riil.
13	Penilaian responden terhadap program MBG yang mampu mengurangi beban ekonomi	37,04%	Tidak Setuju	Persepsi mahasiswa menunjukkan keraguan bahwa MBG mampu berdampak signifikan dalam meringankan beban ekonomi keluarga.
14	Penilaian responden terhadap keefektifan program MBG dalam mengurangi stunting di Indonesia	62,96%	Tidak Setuju	Responden cenderung menilai program ini belum memiliki efektivitas tinggi dalam menurunkan angka stunting dan kekurangan gizi.
15	Penilaian responden terhadap peningkatan kualitas pendidikan akibat MBG	60,49%	Tidak Setuju	Mahasiswa tidak sepenuhnya yakin bahwa MBG akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pendidikan.
16	Penilaian responden terhadap program MBG yang membebani APBN	69,13%	Tidak Setuju	Sebagian besar mahasiswa menilai MBG berpotensi menambah beban keuangan negara di masa mendatang.
Jumlah		59,66%	Tidak Setuju	

Sumber: Diolah dari data primer

Berdasarkan Tabel 4 diatas, rata-rata penilaian mahasiswa terhadap program MBG tercatat sebesar 59,66%, yang juga termasuk dalam kategori Tidak Setuju (negatif). Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa menilai program MBG belum sepenuhnya efektif dan relevan dengan kebutuhan serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat Indonesia saat ini. Meskipun tujuan program dinilai baik dan patut diapresiasi, pelaksanaannya masih dianggap kurang optimal, terutama menyangkut keberlanjutan pembiayaan jangka panjang, kejelasan mekanisme distribusi, serta bukti empiris mengenai dampaknya terhadap penurunan angka stunting dan kemiskinan. Lebih lanjut, mahasiswa berpendapat bahwa keberhasilan MBG tidak cukup hanya bergantung pada pemberian makanan bergizi secara seremonial, melainkan harus diiringi dengan pendekatan holistik yang mencakup pemberdayaan ekonomi keluarga, peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan dasar, serta program edukasi gizi yang berkelanjutan bagi masyarakat luas. Tanpa pendekatan yang komprehensif, program ini dinilai berisiko menjadi kebijakan yang populis, tetapi tidak berdampak signifikan dalam jangka panjang.

4. Aspek Sikap

Pada aspek sikap, lima butir pernyataan disusun untuk mengukur respons emosional dan rasional mahasiswa PPKn UNP terhadap pelaksanaan Program MBG. Instrumen ini bertujuan untuk menangkap sejauh mana mahasiswa menunjukkan dukungan, kekhawatiran,

atau bahkan penolakan terhadap kebijakan tersebut setelah mempertimbangkan berbagai dinamika dan implikasi yang ada pada program ini.

Tabel 5. Aspek Sikap

No	Pernyataan	Nilai (%)	Kategori	Keterangan
17	Kekhawatiran responden terhadap biaya program BMG yang dapat mengganggu sektor lain	72,84%	Tidak Setuju	Mahasiswa menunjukkan kekhawatiran kuat bahwa alokasi dana MBG dapat mengurangi anggaran untuk sektor vital lainnya.
18	Sikap responden terhadap program MBG yang di prioritaskan untuk masyarakat kurang mampu	82,72%	Tidak Setuju	Responden menilai bahwa program MBG belum sepenuhnya tepat sasaran dan perlu pembatasan agar fokus pada kelompok miskin.
19	Kekhawatiran responden terhadap program MBG tidak menyelesaikan masalah	71,60%	Tidak Setuju	Mahasiswa menilai MBG berpotensi menjadi kebijakan temporer tanpa dampak jangka panjang yang signifikan.
20	Sikap responden jika menjadi salah satu penerima program MBG	59,26%	Tidak Setuju	Menunjukkan tingkat kepercayaan rendah terhadap kualitas dan keamanan makanan dalam program MBG.
21	Sikap rerponder terhadap keberlanjutan program	71,60%	Tidak Setuju	Mahasiswa cenderung tidak mendukung keberlanjutan program MBG setelah memahami dinamika dan permasalahannya.
Jumlah		71,60%	Tidak Setuju / Negatif	

Sumber: Diolah dari data primer

Adapun pada Tabel 5, rata-rata sikap mahasiswa terhadap program MBG berada pada angka 71,60%, yang tergolong dalam kategori Tidak Setuju (negatif). Temuan ini menegaskan bahwa sebagian besar mahasiswa menunjukkan sikap yang kritis dan cenderung skeptis terhadap pelaksanaan program MBG, terutama dalam tiga hal utama, yaitu keberlanjutan anggaran di tengah keterbatasan fiskal negara, efektivitas pelaksanaan di tingkat daerah, serta keadilan dalam distribusi manfaat antarkelompok masyarakat. Mahasiswa menilai bahwa meskipun program ini memiliki maksud sosial yang baik, pelaksanaannya masih menyisakan berbagai kekhawatiran, seperti potensi tumpang tindih dengan program-program bantuan sosial yang sudah ada, serta risiko membebani sektor-sektor lain yang justru lebih mendesak dan prioritas, misalnya pendidikan dan infrastruktur dasar. Sikap kritis ini tidak lahir dari ketidaktahuan, melainkan dari proses refleksi yang cukup matang terhadap realitas politik dan ekonomi yang tengah berlangsung. Dengan

demikian, sikap mahasiswa mencerminkan posisi yang rasional, tidak emosional, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan substantif.

Pengetahuan yang tinggi belum menjamin penerimaan terhadap kebijakan

Temuan penelitian menunjukkan adanya pola yang menarik dalam persepsi mahasiswa terhadap Program MBG, yaitu tingkat pengetahuan mengenai program relatif tinggi, sedangkan pada dimensi pendapat, penilaian, dan sikap ditemukan kecenderungan yang lebih kritis. Pola tersebut menunjukkan bahwa mengetahui suatu kebijakan tidak selalu berarti menerima kebijakan tersebut secara keseluruhan. Dalam konteks kebijakan publik, pengetahuan berkaitan dengan kemampuan individu memahami keberadaan, tujuan, sasaran, serta karakteristik kebijakan, sedangkan penerimaan berkaitan dengan bagaimana kebijakan tersebut dinilai berdasarkan pelaksanaan dan konsekuensinya. Hal ini sejalan dengan kajian Herdiana (2025) yang menunjukkan bahwa implementasi MBG tidak hanya dipengaruhi oleh penerimaan masyarakat terhadap tujuan program, tetapi juga oleh kejelasan aturan, mekanisme distribusi, pengawasan, serta keterlibatan berbagai aktor dalam pelaksanaannya.

Perbedaan antara pengetahuan dan penerimaan tersebut dapat dipahami karena mahasiswa tidak hanya menempatkan MBG sebagai sebuah program dengan tujuan pemenuhan gizi, tetapi juga sebagai kebijakan publik yang menggunakan sumber daya negara dan melibatkan banyak aktor. Oleh karena itu, pemahaman terhadap program dapat berkembang menjadi proses evaluasi terhadap cara pemerintah melaksanakan kebijakan tersebut. Herdiana (2025) menjelaskan bahwa meskipun MBG memiliki faktor pendorong berupa kepemimpinan, dukungan pemerintah daerah dan lembaga pendidikan, serta penerimaan masyarakat sasaran, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa aturan yang belum komprehensif, rantai distribusi yang kaku, serta pengawasan dan keterlibatan masyarakat yang belum optimal.

Dengan demikian, perbedaan antara tingginya pengetahuan dengan kecenderungan pendapat, penilaian, dan sikap yang lebih kritis tidak harus dipandang sebagai sebuah pertentangan. Sebaliknya, kondisi tersebut dapat menunjukkan bahwa mahasiswa mampu membedakan antara tujuan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Mahasiswa dapat memahami bahwa pemenuhan gizi merupakan tujuan penting, tetapi pada saat yang sama mempertanyakan apakah mekanisme pelaksanaannya telah mampu menjamin kualitas, ketepatan sasaran, keamanan pangan, dan keberlanjutan program. Perspektif tersebut sejalan dengan Agnia et al. (2026) yang menemukan bahwa implementasi MBG pada tingkat lokal masih menghadapi persoalan seperti keterbatasan kapasitas pelaksana, ketimpangan akses, persoalan keamanan pangan, serta beban administratif yang dapat memengaruhi kualitas pelayanan kepada penerima manfaat.

Kritik terhadap Implementasi MBG

Jika keseluruhan temuan penelitian dibaca secara satu kesatuan, kecenderungan kritis mahasiswa lebih tepat dipahami sebagai bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan MBG daripada sebagai penolakan terhadap tujuan dasar program. MBG pada dasarnya dirancang sebagai kebijakan untuk meningkatkan pemenuhan gizi dan mendukung pembangunan sumber daya manusia. Namun, ketika kebijakan tersebut diterapkan dalam skala besar, perhatian terhadap tujuan program akan berjalan bersamaan dengan perhatian terhadap persoalan implementasi, seperti pembiayaan, distribusi, kualitas makanan, kapasitas pelaksana, serta mekanisme pengawasan. Waluyo (2025) menjelaskan bahwa MBG merupakan kebijakan yang memiliki dimensi ekonomi-politik karena melibatkan redistribusi sumber daya, intervensi pemerintah, kepentingan berbagai aktor, serta tantangan pembiayaan dan keberlanjutan fiskal.

Hal tersebut menjadi penting dalam membaca persepsi mahasiswa Ilmu Sosial Politik karena penilaian terhadap suatu kebijakan tidak hanya didasarkan pada tujuan sosial yang ingin dicapai, tetapi juga pada bagaimana negara mengelola sumber daya dan menjalankan kebijakan tersebut. Ketika suatu program memiliki cakupan besar, maka tuntutan terhadap tata kelola, koordinasi, transparansi, dan akuntabilitas juga semakin besar. Pemerintah sendiri dalam Nota Keuangan RAPBN 2026 menempatkan penguatan kelembagaan dan tata kelola, pelatihan SDM SPPG, penguatan logistik dan distribusi, komunikasi dan partisipasi publik, serta kemitraan lintas sektor sebagai bagian dari strategi pelaksanaan MBG.

Perkembangan implementasi MBG pada tahun 2026 semakin memperlihatkan bahwa persoalan tata kelola merupakan bagian penting dari keberlanjutan program. Pada Agustus 2026, pemerintah melakukan evaluasi terhadap 27.485 SPPG dan menyatakan bahwa 833 SPPG telah ditutup, sedangkan 455 SPPG lainnya akan ditutup secara permanen karena tidak memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Pemerintah menyatakan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan perluasan program berjalan bersamaan dengan peningkatan kualitas, keamanan pangan, dan ketepatan sasaran.

Kondisi tersebut tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa persoalan implementasi tersebut secara langsung menyebabkan persepsi responden dalam penelitian ini, karena penelitian tidak menguji hubungan sebab-akibat antara perkembangan aktual MBG dengan persepsi mahasiswa. Namun, perkembangan tersebut memberikan konteks penting untuk memahami mengapa evaluasi terhadap implementasi menjadi relevan dalam kebijakan MBG. Temuan Agnia et al. (2026), misalnya, memperlihatkan bahwa pelaksanaan MBG pada tingkat lokal masih menghadapi persoalan kapasitas pelaksana, akses yang belum merata, keamanan pangan, serta dominasi rutinitas administratif. Dengan demikian, perhatian terhadap kualitas implementasi merupakan persoalan yang juga ditemukan dalam penelitian lain dan bukan semata-mata persoalan persepsi responden penelitian ini.

Keamanan Pangan dan Akuntabilitas

Keamanan pangan merupakan aspek yang memiliki posisi penting dalam pelaksanaan MBG karena makanan yang diberikan kepada penerima manfaat secara langsung berkaitan dengan tujuan utama program. Program yang dimaksudkan untuk meningkatkan status gizi tidak cukup hanya menyediakan makanan dalam jumlah yang memadai, tetapi juga harus memastikan bahwa makanan memenuhi standar gizi, mutu, dan keamanan. Hal tersebut telah memperoleh penguatan regulatif melalui Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 5 Tahun 2026 tentang Standar Gizi dalam Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang mengatur standar gizi, komposisi makanan, kualitas pangan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan standar tersebut.

Persoalan keamanan pangan juga menunjukkan bahwa kualitas implementasi memiliki hubungan erat dengan kepercayaan terhadap penyelenggaraan program. Penelitian Erlyn et al. (2026) mengenai tata kelola keamanan pangan MBG di Palembang menekankan pentingnya integrasi sertifikasi higiene dan sanitasi dengan pengawasan operasional. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keamanan pangan dalam MBG memerlukan sistem jaminan yang diterapkan pada berbagai tahapan penyelenggaraan makanan, sehingga pengawasan tidak hanya dilakukan setelah muncul permasalahan, tetapi menjadi bagian dari tata kelola program sejak awal.

Konteks tersebut semakin relevan dengan perkembangan pengawasan MBG pada 2026. Pemerintah memperketat evaluasi SPPG dan menghubungkan pemenuhan standar

higiene sanitasi dengan keberlanjutan operasional SPPG. Langkah penutupan terhadap unit yang tidak memenuhi persyaratan menunjukkan adanya upaya untuk menjadikan standar keamanan pangan sebagai bagian dari pengendalian kualitas program. Dengan demikian, keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh seberapa luas program dapat menjangkau penerima manfaat, tetapi juga oleh kemampuan penyelenggara memastikan makanan yang diberikan aman dan memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Dalam perspektif penelitian ini, kondisi tersebut membantu menjelaskan mengapa aspek pelaksanaan dapat menjadi bagian penting dalam pembentukan persepsi mahasiswa. Mahasiswa yang mengetahui tujuan MBG tetap dapat memberikan penilaian kritis ketika menemukan adanya persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan program. Hal ini sejalan dengan Agnia et al. (2026) yang menunjukkan bahwa persoalan keamanan pangan dan kompetensi tenaga pelaksana menjadi salah satu bagian dari kerentanan implementasi MBG di tingkat lokal. Oleh sebab itu, persepsi kritis terhadap pelaksanaan tidak dapat langsung dimaknai sebagai penolakan terhadap tujuan program, tetapi dapat menunjukkan adanya tuntutan terhadap kualitas penyelenggaraan kebijakan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian mengenai persepsi mahasiswa Prodi PPKn Universitas Negeri Padang terhadap Program Makan Bergizi Gratis Pemerintahan Prabowo-Gibran, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa PPKn UNP cenderung memiliki persepsi negatif terhadap Program MBG pemerintahan Prabowo-Gibran. Rata-rata persepsi mahasiswa dari empat dimensi yang diteliti, yaitu pengetahuan, pendapat, penilaian, dan sikap, sebesar 53,80% dan termasuk dalam kategori negatif. Dimensi pengetahuan memperoleh skor 11,52%, pendapat 72,42%, penilaian 59,66%, dan sikap 71,60%.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan juga bahwa mahasiswa memiliki pemahaman yang relatif baik mengenai keberadaan, tujuan, sasaran, serta karakteristik dasar program. Namun, pemahaman tersebut tidak secara otomatis menghasilkan penerimaan yang positif terhadap seluruh aspek pelaksanaan MBG. Mahasiswa tetap menunjukkan kecenderungan kritis ketika menilai pelaksanaan, pengelolaan, dan konsekuensi kebijakan tersebut.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap MBG lebih tepat dipahami sebagai *sikap kritis terhadap pelaksanaan kebijakan*, bukan sebagai penolakan terhadap tujuan dasar program. Mahasiswa dapat menerima pentingnya pemenuhan gizi bagi masyarakat, tetapi pada saat yang sama mempertanyakan berbagai aspek implementasi, terutama yang berkaitan dengan kualitas makanan, keamanan pangan, pengawasan, penggunaan anggaran, efektivitas pelaksanaan, serta keberlanjutan program. Hal ini memperlihatkan bahwa penerimaan terhadap kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh pemahaman terhadap tujuan kebijakan, tetapi juga oleh keyakinan bahwa kebijakan tersebut mampu dilaksanakan secara tepat, aman, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnia, N., Asyifa, R., Himawan, A. F., Makarim, S. N., & Rahardian, R. (2025). Efektivitas Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Persyarikatan Muhammadiyah Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)*, 5(2), 111-122.

- Asmiati, N., & Sifaunnajah, A. (2025). Evaluasi Persepsi Publik Program Makan Bergizi Gratis menggunakan Text Mining dan Sentimen. *Curtina*, 6(2), 105-114.
- Erlyn, P., Pramayastri, V., Hidayat, B. A., & Saksono, H. (2026). Tata Kelola Keamanan Pangan Program Makan Bergizi Gratis: Integrasi Sertifikasi Higiene dan Sanitasi serta Pengawasan Operasional di Palembang. *Jurnal Bina Praja*, 18(2), 339-352.
- Badan Gizi Nasional. (2026). Juknis dan pedoman penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Badan Gizi Nasional.
- Febryanti, I., Indiati, I., Pane, M. A., & Astuti, P. (2025). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG)(STUDI KASUS PADA SDN 3 KEPANJEN KABUPATEN MALANG. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(1), 067-079.
- Hadinata, M. (2026). Free Nutritious Meal Policy in Indonesia under President Prabowo: A Policy, Fiscal, and Political Analysis Grounded in International Evidence. *Jurnal Bina Praja*, 18(1), 65-78.
- Herdiana, D. (2025). Implementasi kebijakan makan bergizi gratis (MBG): Faktor-faktor pendorong dan penghambat. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(2), 470-478.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2026. Direktorat Jenderal Anggaran.
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2026, August 28). Pemerintah perketat pengawasan tata kelola MBG, 455 SPPG tak penuhi standar ditutup permanen.
- Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 5 Tahun 2026 tentang Standar Gizi dalam Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. (2026). *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 275*
- Waluyo, S. D. (2025). Kebijakan makanan bergizi gratis: Tinjauan ekonomi politik dalam kesejahteraan dan ketahanan pangan. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 12(1), 144-151